

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kritik yang tergambar tentang permasalahan anak jalanan selama ini adalah lemahnya kontrol dalam pengawasan terkait anak jalanan yang mengakibatkan permasalahan anak jalanan sampai saat ini belum membuahkan hasil secara maksimal. Padahal telah banyak aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan anak jalanan, akan tetapi fenomena anak jalanan terus menjadi sorotan yang yang tidak pernah selesai. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai faktor serta desakan kehidupan yang biasanya terjadi di kota-kota besar.

Berbagai faktor yang menyebabkan anak turun ke jalanan dan menjadikan mereka di cap sebagai anak jalanan salah satunya diakibatkan oleh tekanan kemiskinan yang mereka hadapi, faktor lingkungan di dalam keluarga atau masyarakat juga menjadi sebab adanya keberadaan anak jalanan. Anak jalanan sangat mudah dijumpai di jalan-jalan, persimpangan, tempat keramaian seperti pasar, terminal, dan sebagainya. Aktivitas yang mereka lakukan seperti mengamen, mengemis, mengelap kendaraan di lalu lintas, tukang parkir dan banyak macam kegiatan lainnya, yang mana setiap kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang.

Selain itu, faktor keluarga juga menjadi pandangan serius, terdapat beberapa kasus anak jalanan yang mana keluarga atau orangtua mendorong anak dan ikut terlibat untuk menjadi anak jalanan, tak lain anak tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Sehingga hak-hak anak terenggut karena mereka harus melakukan aktivitas ekonomi dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Seharusnya keluarga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak, serta memenuhi kebutuhan anak seperti pendidikan dan kesehatan.

Banyak dijumpai kasus bahwa anak jalanan tersebut berstatus putus sekolah, mereka tidak melanjutkan sekolah karena tidak dapat membayar. Selain itu, dikarenakan sudah terbiasa mencari uang di jalanan, motivasi anak jalanan untuk melanjutkan pendidikan pun sangat kurang.

Dari faktor penyebab tersebut, perlu adanya upaya penanganan dalam mengatasi permasalahan yang terkait anak jalanan. Penanganan anak jalanan haruslah dilakukan secara tepat dan terpadu, yang mana upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi angka anak jalanan dan melakukan pembinaan secara komprehensif kepada anak jalanan. Sehingga dengan adanya pembinaan anak jalanan tersebut, kelak dapat menjadi modal bagi anak jalanan untuk melakukan aktivitas yang lebih positif seperti menawarkan jasa menjahit, service Hp, las atau perbengkelan. Kegiatan tersebut akan didapatkan melalui pemberian keterampilan kepada anak jalanan.

Tentu hal ini tidak terlepas dari Peranan Dinas Sosial sebagai *Leading Sector* dalam menangani dan memberikan pelayanan bagi penyandang masalah sosial, salah satunya adalah anak jalanan. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban, Dinas Sosial melakukan upaya-upaya pencegahan, rehabilitasi dan pembinaan dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu daerah. Hal ini juga perlu upaya penegakkan aturan secara disiplin aturan dan peningkatkan kerja secara optimal, jika tidak maka permasalahan anak jalanan ini tidak akan pernah dapat diselesaikan.

Pada penanganan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Padang telah melakukan pembinaan bagi anak jalanan dengan sitem Pola Pembinaan Terpadu. Selain itu untuk membantu dalam proses penanganan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Padang bekerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Agama wilayah regional Kota Padang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, kemudian juga bekerjasama dengan Batalyon Infantri/133 Yudha Sakti, lembaga pendidikan dan universitas, LKSA atau panti-panti sosial, LSM, serta tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mampu membantu Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak jalanan. Yang mana kegiatan kerjasama tersebut dilakukan secara berkelanjutan.

Maka dengan terciptanya kerjasama dari berbagai pihak diharapkan jumlah angka anak jalanan di Kota Padang mengalami penurunan. Dengan diadakannya penanganan yang tepat melalui pembinaan bagi anak jalanan hal ini dapat

mendukung terciptanya Kota Padang sebagai Kota Layak Anak yang akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kota Padang dan juga masyarakatnya.

Jika dikaitkan dengan teori sosiologi yang digunakan yaitu Teori Struktural Fungsional bahwa Dinas Sosial dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mana terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan bagian yang satu tidak akan dapat berfungsi jika tidak adanya hubungan dengan bagian lainnya. Hal ini dapat digambarkan bahwa, Dinas Sosial Kota Padang tidak akan dapat melakukan penanganan anak jalanan sendiri, karena terdapat bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan dalam penanganan anak jalanan yang tidak dimiliki oleh Dinas Sosial. Seperti layanan keagamaan, pendidikan dan kesehatan. Pasti ini membutuhkan kerjasama yang solid dalam mencapai tujuan bersama, jika hal ini tidak dilakukan maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan.

Konsep AGIL yang ditawarkan pada teori ini, sangat relevan dengan peran yang dimainkan oleh Dinas Sosial seperti ; a) Adaptasi, yang mana diketahui bahwa Dinas Sosial merupakan *leading sector* dalam upaya menanggulangi permasalahan sosial dengan kondisi genting sehingga dibutuhkan penanganan secara cepat dan tepat sesuai dengan permasalahan sosial yang dihadapi dan disesuaikan dengan kebutuhan layanan yang akan diberikan; b) *Goal* (Tujuan), Dinas Sosial memiliki tujuan agar masyarakat/individu/kelompok dapat keluar dari permasalahan sosial yang dihadapinya, sehingga dapat berfungsi secara sosial; c) Integrasi, dalam sebuah sistem di Dinas Sosial harus ada hubungan antar bagian-bagian yang mendukung dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti hubungan antar bidang, instansi atau sebagainya.; dan s) *laten* (pemeliharaan pola), merupakan penciptaan sistem yang berkaitan dengan memperbaiki suatu hubungan, meningkatkan motivasi dan menciptakan pola-pola kerja agar proses dalam penanganan anak jalanan dapat dilakukan secara tepat dikarenakan kerjasama dan semangat suatu instansi dalam memberikan pelayanan hal ini juga didukung oleh SDM yang berkualitas dan mumpuni dalam melakukan penanganan masalah.

## 6.2 Saran

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini perlu dilanjutkan untuk menganalisis mengenai kebijakan dan penanganan dari suatu permasalahan sosial khususnya mengenai persoalan anak jalanan. Peneliti juga berharap adanya saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk perbaikan hasil penelitian selanjutnya, sebagai mana berikut:

1. Dalam melakukan upaya penanganan anak jalanan, diperlukannya sosialisasi, pengawasan dan pengendalian secara intensif dan berkelanjutan oleh Dinas Sosial serta meningkatkan kerjasama antar berbagai sektor.
2. Upaya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang melalui Pola Pembinaan Terpadu sudah baik, karena dalam hal ini Dinas Sosial tidak mungkin melakukan penanganan anak jalanan sendiri, pasti melibatkan berbagai unsur dalam mencapai tujuan secara tepat dan optimal.
3. Diperlukannya, inovasi-inovasi baru seperti peningkatan mutu layanan, pemberian keterampilan, dan memberikan ruang bagi anak untuk rekreasi sehingga, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang lebih positif. Karena diketahui anak jalanan sering terjerumus ke arah pergaulan yang negatif, sehingga pemberian ruang bagi anak untuk rekreasi lewat karya sangat dibutuhkan.
4. Dibutuhkannya pengawasan lebih dari keluarga dan orangtua. Diharapkan anak jalanan tersebut dapat merasa aman dan nyaman ketika berada dalam keluarga. Selain itu, edukasi dan pengarahan perlu dilakukan bagi keluarga yang memiliki anak jalanan, memberikan pengertian, dan menjelaskan resiko-resiko yang akan terjadi jika anak tetap menjadi anak jalanan.